



Judul : MKD Masih Butuh Verifikasi
Tanggal : Sabtu, 12 September 2015
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 4

MKD Masih Butuh Verifikasi

Formappi: Kasus Setnov cs-Trump Untungkan HT

JAKARTA-Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) merubah mekanisme proses dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov) serta wakilnya Fadli Zon beserta rombongan. Lembaga penindakan pelanggaran kode etik bagi wakil rakyat itu menindaklanjutinya tanpa aduan. Padahal, terdapat tujuh orang anggota DPR RI yang mengadukan dugaan pelanggaran Setnov Cs ke MKD serta barang buktinya pada Senin (7/9) lalu.

"Sebelum bukti diserahkan, MKD menemukan masalah ini melalui media massa, tanpa diserahkan kita juga sudah punya sebagian alat bukti dan alat bukti yang lain masih dicari, diverifikasi untuk kemudian apakah dapat dilanjutkan atau tidak ke

proses selanjutnya," ungkap Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua MKD kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (11/9).

Sejatinnya, kata politisi Partai Gerindra itu, MKD saat ini tengah dalam tahap menelusuri alat bukti. Apakah nanti cukup bukti atau tidak? Itulah menjadi tolak ukur apakah melanggar etika atau tidak dan layak atau tidak disidangkan "Karena semuanya masih sumir, apalagi pihak yang terkait belum kembali ke Indonesia dan yang berkembang sekarang ini adalah opini-opini dari berbagai pihak," tukas Dasco yang juga anggota Komisi III DPR RI itu.

Dia mengaku, penelusuran alat bukti itu baru masuk dalam proses verifikasi. Untuk proses menuju persidangan itu masih sangat jauh.

"Idealnya kasus yang masuk ke MKD yang diadakan, bukti serta saksi-saksi kita panggil, tak menutup kemungkinan siapapun yang kita anggap terkait harus

dimintai keterangan bahkan mungkin anggota keluarga atau istri. Namun, hal itu dilihat dulu perkembangannya," kata Dasco.

Berapa lama verifikasi yang dilakukan MKD? Dasco menyatakan, dalam aturan UU MD3 juga tidak diatur berapa lama, tapi mudah-mudahan kawan-kawan yang di bagian verifikasi bekerja semaksimal mungkin, jadi tidak memakan waktu yang terlalu lama.

Dia juga mengatakan, soal proses yang dilakukan oleh MKD harus secara tertutup. Hal itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. "Memang ada UU yang mengatur bahwa proses yang dilakukan di MKD tidak dapat dilakukan secara terbuka. Begitulah UUnya. Jadi bila memang ada perubahan ya harus UUnya dulu yang dirubah. Bila MKD membuat kebijakan lain tentu melanggar UU," pungkasnya.

Disinggung apakah sasu ini benar melanggar kode etik kedewanan? Dasco mengaku sebelum

kasus ini dipanelkan, MKD tidak dapat mengatakan apapun, karena proses panelisasi ini terdapat empat unsur. Pertama unsur dari luar dan unsur dari MKD itu sendiri.

"Yang pasti MKD akan melakukan proses sesuai dengan ketentuan baik kasus menonjol atau tidak menonjol sudah ada tata cara beracara. Disitu diatur mulai dari proses laporan masuk sampai penyidangan memanggil dan lain-lain. Nah itu justru tahapan yang tidak boleh dilalui, jangan kita mau cepet bypass-pypass justru nanti cacat formal. Sehingga tahapan itu harus dilalui," paparnya.

Soal independensi, tambah Dasco, dirinya berpendapat pihak-pihak yang duduk di MKD itu terdiri dari unsur-unsur fraksi yang ada di DPR. Sehingga saat mengambil keputusan tidak dilakukan oleh satu, dua atau tiga orang saja.

Terpisah, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang justru memandang perte-

muan Setnov cs dengan Donald Trump menguntungkan pengusaha besar Indonesia, Harry Tanoesoedibjo (HT). Sebab, dalam peristiwa ini HT berhasil membuktikan kuatnya jaringan dirinya pada elite Indonesia.

Menurut Sebastian, Hary Tonoed dinilai mampu membawa dua orang penting ke hadapan Donald Trump. "Istilahnya mereka (Setya dan Fadli, red) 'ditenteng tenteng' oleh HT. Lalu selanjutnya diperkenalkan ke Donald Trump," ujarnya saat dihubungi melalui ponselnya, Jumat (11/9).

Sebastian menganalisis, pertemuhan tersebut ada kaitannya dengan mega proyek bisnis yang sedang digarap oleh Donald Trump dan HT. Dimana, keduanya akan membangun tempat hiburan dan juga penginapan mewah yang bertempat di Bali dan Bogor. Jadi Setya dan Fadli dijadikan legitimasi untuk memperkuat proyek bisnis yang sedang berjalan. (aen)